KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM *CAPACITY BUILDING FOR PALESTINE (2008-2013)*

INDONESIA'S NATIONAL INTEREST ON CAPACITY BUILDING FOR PALESTINE (2008-2013)

Billyadin Insanu Muharam

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur No. 112-116, Bandung, 40132, Indonesia

Muharamisbillyadin@gmail.com

Abstract

This research attemps to analyze the national interest of Indonesia in the provision of technical assistance in the form of capacity building or capacity-building. The Palestinian position which is the only country that has not konferesni Asian African independence, it made Indonesia tyring to make an efforts as a form of solidarity and support for the Palestinians. Support provided Indonesia reached by various ways such as through international conference as well as bilaterally. Multilateral step it is by taken a Palestinian issue in the New Asia Africa Strategic Partnership, which is a new form of cooperation Asia and Africa countries.

The method used is a qualitative method. Data were collected by conducting interviews and literature studies as well as the search website.

These results indicate that purpose do by Indonesia in the provision of technical assistance in the form of capacity building or capacity-building and meperlihatakan results obtained by Indonesia after Capacity building or capacity development for the Palestinians.

Keywords: National Interest Indonesia, Capacity building, Palestine

Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis kepentingan nasional Indonesia dalam pemberian bantuan teknis berupa *Capacity building* atau pengembangan kapasitas bagi Palestina. Posisi Palestina yang merupakan satu-satunya negara konferensi Asia Afrika yang belum merdeka membuat Indonesia berupaya melakukan berbagai upaya sebagai sebuah bentuk solidaritas dan dukungan bagi Palestina. Dukungan yang diberikan Indonesia ditempuh dengan berbagai cara salah satunya melalui forum-forum internasional maupun secara bilateral. Langkah melalui forum internasional yang dilakukan dengan cara mebawa isu Palestina dalam *New Asia Africa Strategi Partnership*, yang merupakan sebuah bentuk baru dari kerja sama Negara-negara Asia dan Afrika.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan studi literatur serta penelusuran *website.*

Hasil penelitian ini menunjukan tujuan yang dilakukan oleh Indonesia dalam pemberian bantuan teknis berupa *Capacity building* atau pengembangan kapasitas serta meperlihatkan hasil yang didapat oleh Indonesia setelah melakukan *Capacity building* atau pengembangan kapasitas terhadap Palestina.

Kata kunci: Kepentingan Nasional Indonesia, pengembangan kapasitas, Palestina

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Negara sebagai aktor dalam hubungan internasional merupakan kumpulan dari masyarakat yang dijadikan sebagai alat yang dituntut untuk mampu mengendalikan persoalan bersama seperti keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan. Hal ini membuat setiap negara memiliki kepentingan nasional yang harus dipenuhi dengan berbagai cara, baik melalui cara yang ditempuh di dalam negeri maupun yang ditempuh melalui hubungan dengan negara lainnya. Karena itu suatu negara harus menjalin hubungan dengan negara lain atau aktor-aktor lain di dalam sistem internasional (Jemadu, 2014 : 48).

Setiap negara berdaulat memiliki kebijakan politik luar negeri tersendiri dan kebijakan luar negeri setiap negara tentunya berbeda, umumnya kebijakan luar negeri suatu negara akan didasari pada kepentingan nasionalnya, perbedaan kepentingan nasional dari setiap negara tentunya akan melahirkan kebijakan luar negeri yang berbeda pula, termasuk Indonesia yang memiliki kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Kebijakan yang dibuat oleh Muhammad Hatta ini menggambarkan posisi Indonesia dalam melakukan interaski diranah internasional.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia didasarkan pada UUD Republik Indonesia tahun 1945 alenia pertama dan alenia ke-empat. Dimana pada alenia pertama Indonesia dengan tegas menyatakan :

“ Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas di dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan”. Dan alenia ke empat “.. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial*”*.

Kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dapat dilihat ketika Indonesia menjadi salah satu negara pelopor konferensi Asia – Afrika yang diadakan pada tahun 1955. Konferensi yang ditujukan untuk membangun kerjasama negara-negara di kawasan Asia-Afrika dan untuk menumbuhkan semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang pada masa itu tengah memperjuangkan kemerdekaan tanah air mereka, sehingga kemudian lahirlah sejumlah negara merdeka di kawasan Asia dan Afrika. Dari konferesi tersebut juga melahirkan pernyataan politik atas prinsip-prinsip dasar dalam upaya memajukan perdamaian dan kerjasama dunia.

Setelah berhasil menjadi salah satu Negara penyelenggara KAA, Indonesia kemudia menjadi Negara yang aktif berperan dalam Gerakan Non-blok. Selain itu bukti nyata penerapan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia memberikan dukungan atas kemerdekaan Palestina.

Sikap Indonesia dalam memberikan dukungan dan bantuan bagi rakayat Palestina bukan tanpa alasan, sejak tahun 1940-an konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel selalu menjadi pusat perhatian masyarakat internasional. Konflik antara Palestina Israel dapat dikatakan sebagai konflik yang tak berujung, dilatar belakangi oleh masuknya orang Yahudi ke kawasan Palestina yang kemudian mendirikan negara Israel pada 14 Mei 1948 membuat gejolak konflik antara kedua negara tersebut semakin memanas. Konflik yang tidak berimbang ini membuat Palestina menjadi negara yang harus menerima kerugian dan dampak yang cukup besar.

Akibat konflik terjadi tersebut membuat Palestina harus mengalami penciutan luas wilayah yang sangat signifikan dan memaksa wilayah Palestina terbagi dalam dua wilayah yakni wilayah Jalur Gaza yang memiliki luas 360km² dan wilayah Tepi Barat yang memiliki luas wilayah 5860km². Selain terpisah menjadi dua wilayah, Israel juga melakukan kontrol terahadap sekitar 60% dari wilayah Tepi Barat, hal ini menyebabkan dua pertiga atau 40 % dari

wilayah Tepi Barat tidak dapat di akses oleh warga Palestina karena terkait dengan infrastruktur dan pemukiman. Kondisi ini membuat adanya pembatasan akses barang, termasuk makanan dan obat-obatan terutama di daerah Gaza yang merupakan daerah yang sering mendapatkan serangan dari Israel. Blokade di Jalur Gaza mengakibatkan sebanyak 14.920 rakyat Palestina di Jalur Gaza menjadi tunawisma, termasuk 12.000 orang di antara mereka yang pindah ke gedung-gedung milik PBB atau sekolah-sekolah pemerintah Blokade yang dilakukan semakin membuat perekonomian dan pemerintahan Palestina lumpuh. Agresi Israel memukul drastis perekonomian di Gaza sekitar 80% warga Palestina di Gaza memerlukan bantuan dan kondisi mereka semakin buruk akibat kepungan Israel. Berdasarkan perhitungan terbaru, sekit ar 35% lahan pertanian di Gazadan 85% wil ayah perairannya tidak dapat diakses oleh w arga Palestina (diakses melalui http://sahabatalaqsha.com/nws/?p=9238 pada 5 Maret 2016).

Sedangkan di Tepi Barat, Israel melakukan blokade yang membuat warga Palestina sulit untuk mengakses wilayah Tepi Barat. Blokade yang dilakukan Israel berupa blokade fisik dimana Israel membuat dinding yang tidak dapat dilewati warga Palestina. Wilayah Tepi Barat merupakan daerah kunci dari Palestina dimana Tepi Barat merupakan jantung politik dan ekonomi Palestina. Blokade-blokade yang dibuat oleh tentara Israel membuat wilayah-wilayah Palestina terpecah menjadi daerah-daerah yang terisolasi. Laporan ILO menyatakan bahwa tingkat pengangguran dikalangan laki-laki muda adalah 80% dan perempuan 63%. Selain hal tersebut warga Palestina juga bergantung pada bantuan kemanusian yang diberikan oleh neg ara lain (diakses melalui https://www.islamp os.com/dampaknegatifnkonflikpalestinamuncul kan-banyak-pengangguran-186461/ pada 5 Maret 2016).

Untuk membantu Palestina Indonesia memberikan berbagai dukungan baik melalui hubungan bilateral maupun dukungan yang ditempuh melalui forum-forum internasional seperti dalam DK PBB, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan pertemuan rutin KAA. Selain itu dukungan melalui forum internasional juga diberikan Indonesia terhadap Palestina dalam *New Asia Afrcia Strategic Partnership (NAASP)* yang merupakan bentuk baru dari kerjasama Negara-negara peserta KAA.

Melalui NAASP Indonesia berhasil menginisiasi bantuan berupa pengembangan kapasitas atau *capacity building* bagi warga Palestina. Program yang bernama *Capacity Building For Palestine* merupakan hasil dari pertemuan *NAASP Ministerial Conference* on *Capacity Building for Palestine* yang dilaksanakan pada tahun 2007 dianggap mampu memenuhi keinginan Indonesia untuk membantu Palestina.

Program *capacity building* ini dinilai sangat berguna bagi kelangsungan warga Palestina untuk menjalankan sebuah bangsa. Bantuan teknis berupa *capacity building* tersebut merupakan sebuah upaya membangun sumberdaya manusia yang profesional sehingga begitu kemerdekaan sudah diraih oleh bangsa Palestina, penyelenggaraan negara dan sektor-sektor publik dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain kebijakan *Capacity Building for Palestine* ini ditujukan sebagai sebuah strategi untuk mempersiapkan kehidupan warga Palestina pasca kemerdekaan dan bukan sebuah strategi yang dibentuk untuk mencapai kemerdekaan. Program *capacity building* merupakan bantuan teknis yang diberikan kepada masyarakat Palestina dan pejabat pemerintah. Melalui program tersebut warga Palestina akan mendapatkan pelatihan ditiga sektor yaitu pemerintahan, infrastruktur dan pembangunan sosial budaya(http://www.tablo iddiplomasi.org/previous-isuue/103-juli-2010/852-program-capacity-building-untuk-palestina.html).

Indonesia selaku negara penggagas menunjukan komitmennya dengan melakukan 24 program pelatihan bagi warga dan pemerintah Palestina. Program yang dilakukan sejak tahun 2008 hingga 2013. Sebanyak 1000 orang warga Palestina yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas oleh Indonesia. Program yang dilkakukan Indonesia sendiri antara lain meliputi pelatihan dibidang ekonomi, kesehatan, pemerdayaan pemuda dan perempuan, pendidikan serta tekonlogi dan informasi (http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/103-juli-2010/852-program-capacity-building-untuk-palestina.html. diakses pada 7 Mei 2016).

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Major

“ Bagaimana kepentingan nasional Indonesia daam *Capacity Building For Palestine ?”*

1.2.2 Rumusan Minor

1. Bagaimana tujuan yang diharapkan Indonesia dalam *Capacity Building for Palestine*?
2. Bagaimana posisi program *Capacity Building for Palestine* dalam kepentingan nasional Indonesia ?
3. Bagaimana hasil yang didapat Indonesia dalam *Capacity Building for Palestine* yang dilakukan oleh Indonesia ?

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sikap Indonesia yang secara konsisten memeberikan dukungannya terhadap Palestina yang dilakukan melalui berbagai upaya dan tindakan salah satunya adalah melalui *New Asia Africa Strategic Partnership Capacity Building for Palestine* Melalui penelitian ini peneliti juga bermaksud untuk mengtahui maksud serta tujuan yang dilakukan oleh Indonesia dalam setiap program pelatihan yang diberikan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui upaya Indonesia menjaga perdamain dunia.
2. Untuk mengetahui cara Indonesia menjaga konsistensinya dalam pemberian dukungan terhadap Palestina.
3. Untuk mengetahui maksud dan tujuan Indonesia dalam program *New Asia Africa Strategic Partnership Capacity Building for Palestine*.

1.4.Kegunaan Penelitian

Diharapkan melalui peneltian dapat menambah wawasan peneliti serta memberikan atau menambah pembendaharaan pustaka, serta dapat memberikan sedikit sumbangan bagi ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai kepentingan nasional Indonesia dalam *Capacity Building for Palestine*

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional muncul ketika adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi ke dalam wilayah-wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara – negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia, yang kemudian negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang menjadi sebuah sistem global (Jackson & Sorensen, 2005 : 2).

Moderenisasi membuat hubungan internasional bukan hanya hubungan negara-negara tetapi juga merupakan hubungan anatar masyarakat, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi yang berasal dari Negara yang berbeda (Jackson & Sorensen, 2005: 144). Kajian hubungan internasional dapat dilihat dari empat dimensi, antara lain :

1) Hubungan – bukan hanya hubungan antar Negara tetapi hubungan yang melintasi batas negara. Seperti interpendensi ekonomi, hutang dunia ketiga, perdagangan

internasional dan penyebaran *multi national corporations,* ketidaksetraan dalam berbagai bentuk dan ekonomi regional dan asosiasi politik seperti Uni Eropa, *the Organization of African Unity* (OAU), the *Association of Southeast Asia Nation* (ASEAN) and the *Gulf Coopertion Council (* GCC).

2) Aktor – Negara – Bangsa, *transnational corporations,* financial market, oranisani non-pemerintah, komunitas politik supranasional, actor subanasional berdasarkan etnis, afiliasi agama ataupun cultural dan oragnisasi inetnasional seperti *North Atlantic Organization (NATO), the Red Cross/Red Crescent* dan *World Bank*.
3) Isus Empiris – Globalisasi dan isolasi, hak asasi manusia, intervensi dan kedaulatan, bantuan, pengungsi, etnis, gender, konesevasi lingkungan, AIDS, narkoba, kejahatan teroganisir.
4) Isu Filosofis – permasalahan epistemologi, ontologi, dan metodelogis, perspektif gender, perdebatan anat paradigm, etika dan kebijakan luar negeri (Burchill, 2001: 9).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Dalam kepentingan nasional peran 'negara' sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. Seorang ahli, Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatasi (Sorensen, : 2005 : 89).

Kepentingan nasional yang dimiliki oleh setiap negara berbeda satu sama lain dipengaruhi oleh faktor – faktor demografi, karakter, budaya, bahkan *history* membuat terciptanya kepentingan nasional yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan – keungulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral kesemua itu kembali pada kebutuhan negara.

Setiap negara merefleksikan sesuatu yang berbeda ketika berinteraksi dalam lingkungan internasional. Untuk menciptakan hubungan yang tertib di dunia internasional dalam pencapainnya akan tujuan – tujuan nasionalnya, salah satu hal yang perlu untuk dilakukan adalah menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasional.

Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi yang membagi kepentingan nasional,yaitu:

1. *Primary Interest*, dalam kepentingan nasional ini perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Semua negara mempunyai kepentingan ini dan sering dipertahankan dengan pengorbanan besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.
2. *Secondary Interest*, kepentingan selain kepentingan primer tetapi cukup memberikan konstribusi, seperti melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan kekebalan diplomatik di luar negeri.
3. *Permanent Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama.

4. *Variable Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada suatu waktu tertentu.
5. *General Interest*, kepentingan yang diberlakukan untuk banyak negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan lain – lain
6. *Specific Interest*, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana (Coulombis dan Wolfe. 2004 : 110).

2.1.3 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan aksi dari suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya yang diformulasikan dari kepentingan internasional, kapabilitas, pembuat kebijakan, kebutuhan, dan aspirasi dari masyarakat (Holsti,2005:19).

Kebijakan luar negeri melibatkan cita-cita, strategi, tindakan, metode, panduan, arahan, pemahaman,kesepakatan dan sebagainya, yang dengannya pemerintah nasional saling melakukan hubungan internasional dan dengan organisai internasional dan aktor lain (Jackson & Sorensen, 2014: 439).

Terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh sebuah Negara dalam menentukan kebijakan luar negerinya, antara lain adalah ;

1) Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional kedalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik,
2) Menerapkan faktor situasional dilingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri,
3) Menganilisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki,
4) Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menganggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
5) Melaksanakan tindakan yang diperlukan,

Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki (Perwita dan Yani, 2005:50).

2.1.4 *Capacity Building*

Capacity Building dapat dikatakan sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan seseorang, kelompok, ataupun organisasi. Terrance Morison mendifinisikan *Capacity Building* sebagai sebuah proses untuk mempengaruhi, atau menggerakan, perubahan diberbagai tingkatan pada individu, kelompok, organisasi dan sistem sebagai usaha memperkuat kemampuan adaptasi diri dan organisasi, sehingga mereka dapat merespon perubahan lingkungan yang terjadi secara terus menerus. *Capacity Building* adalah sebuah proses bukan suatu hasil. *Capacity Building* adalah sebuah proses pembelajaran secara multi level yang erat kaitanya dengan ide terhadap tindakan (Morrison, 2001: 4).

Capacity building atau pengembangan kapasitas difokuskan dalam beberapa dimensi, antara lain ;

1. Pengambangan Sumber Daya Manusia

   Menciptakan personil yang profesional dan memiliki kemampuan teknis melalui kegiatan seperti pelatihan, praktek langsung, kondisi iklim kerja, dan rekruitmen
2. Penguatan organisasi

   Tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan perdan dan fungsi, melalui kegiatan sistem intensif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, dan komunikasi struktur manajerial.
3. Reformasi kelembagaan

   Kelembagaan dan sistem serta makro struktur, melalui kegiatan aturan main ekonomi dan politik perubahan kebijakan dan regulasi dan reformasi konstitusi (Grindle, 2009: 72).

3. Objek dan Metode Penelitian

Dalam peneletian ini Metode penelitian adalah metode penelitian kualitatif. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia dan sesuai dengan ilmu yang didapatkan dalam studi hubungan internasional. Objek dalam penelitian ini adalah Indonesia dan Palestina, dimana untuk mendapatkan data dilakukan penelitian di Direktorat Kerjasama Teknis Kementerian Luar Negeri.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Tujuan Yang Diharapakan Indonesia Dalam *Capacity Building for Palestine*

4.1.1 Komitmen Indonesia Dalam *NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine*

Sebagai bentuk komitmen yang dilakukan Indonesia untuk memenuhi tujuan *Capacity Building For Palestine* adalah dengan memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh Palestina. Terhitung sejak tahun 2008 hingga tahun 2013 sebanyak 1,417 orang warga Palestina telah mendapatkan pelatihan pengembangan kapasitas dalam kerangka NAASP *Capacity Building For Palestine.* Melalui 139 program diberbagai bidang meliputi bidang pertanian, perindustrian, *project cycle, ICT, microfinance,* keuangan dan perpajakan, pemberdayaan perempuan, insfratuktur, konstruksi pariwisata, *fire rescue,* migrasi, konservasi, dan lain-lain dengan bantuan senilai kurang lebih mencapai USD 1,8 juta (diakses melalui http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/103-juli-2010/860-palestina-capacity-building-dan-upaya-reformasi.html pada 23 Juni 2016).

Adapun program-program pelatihan yang diberikan Indonesia untuk memenuhi tujuannya dalam *Capacity Building For Palestine* antara lain sebagi berikut ;

1. *Small and Medium Enterprises*

Small And Medium Enterprises atau Usaha Kecil Menengah merupakan pelatihan dibidang ekonomi yang diberikan oleh Direktorat Kerjasama Teknik Kemlu bersama-sama dengan Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, Astra serta BPPT. Kondisi Palestina yang berada dalam konflik selama 60 tahun mengakibatkan adanya hambatan yang cukup besar bagi Palestina untuk mengembangkan potensi ekonomi Palestina. Oleh karena itu Pemerintah memberikan bantuan dibidang UKM yang dibagi ke dalam beberapa fase yang dilaksanakan di Indonesia dan di Yordania terhitung sejak tahun 2008 hingga 2013. Pelatihan UKM yang diberikan kepada warga Palestina antara lain ;

a) *Training Of Business Incubator For Small Medium Enterprises*
b) *International Training Program On Microfinance For Asian – Afrcia Countries*
c) *Asia Africa Conference On Open Source*
d) *Information and Communication Technology Workshop For Small Medium Enterprises*
e) *International Training Workshop On Microfinance For Palestine*

2. Pengelolaan Bencana

Dalam memberikan pelatihan dibidang pengelolaan bencana Indonesia mengadakan *Training Course on FireRescue* yang diikuti oleh 2 (dua) warga Palestina pada tanggal 15 November-14 Desember 2010 di Jakarta. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi individu petugas Palestina yang terlibat secara langsung dalam upaya penyelamatan korban dan harta benda akibat kebakaran dan situasi darurat lainnya yang sering dihadapi oleh rakyat Palestina.

3. Pariwisata

Dalam bidang pariwisata Indonesia memberikan pelatihan *International Training Workshop on Tourism and Antiquities for*

Palestine. Pelatihan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama Teknis Kemlu bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta *Non-Alihmed Movement Centre for South-South and Technical Cooperation (* NAM CSSTC) yang diselenggarakan di kota Jakarta dan kota Bandung (diakses melalui http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/beta/mba/2012/06/01/international-training-on-tourism-and-antiquities-for-palestine/ pada 24 Juni 2016).

4. Pendidikan, Budaya dan Pelatihan Diplomatik

Pelatihan dibidang pendidikan,budaya dan Pelatihan Diplomatik dilaksanakan yang diberikan oleh Indonesia terhadap Palestina memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap Diplomat Palestina serta pelaku budaya Palestina sehingga dapat membantu Palestina untuk melakukan interaksi dengan negara lain dengan cara diplomasi. Selain memberikan pelatihan dalam bidang diplomatik Indonesia juga memberikan peltihan bahasa Indonesia bagi warga Palestina. Pelatihan dalam bidang pendidikan, budaya dan pelatihan diplomatik diberikan melalui progam-program berikut ;

A. Pelatihan Diplomatik:

1. Diplomatic Training Program For Palestinian Diplomats
2. Senior Diplomatic Training Course
3. Diplomatic Training Juniors
4. The Diplomatic Protocol Training
5. Mid Career Diplomatic Training Course
6. *International Workshop On Diplomatic Leadership For Asia Africa Pascific Countries*

B. Pendidikan dan Budaya:

1) Introduction to Indonesian Language Course
2) English Course For High Level Officials
3) Scholarship
4) Indonesia Language Course For Palestinians Tour Guide
5) Training Course On Conservation And Restoration Of Monuments And Sites.

5. *Women empowerment, Reporoduction and Health*

Dilaksanakan di Jakarta oleh Direktorat Kerjasama Teknik Kemlu dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI merupakan sebuah program pelatihan yang ditujukan untuk menjadi perempuan sebagai salah faktor yang memiliki perang dalam proses pembangunan sebuah negara, program tersebut meliputi :

a) International Workshop On Women Empowerment In Economic Development
b) Training On Vocational Rehabilitation For Persons With Disabilities
c) International Training Workshop On Women Empowerment In IT
d) Training Local Government Support For Mother And Children Program
e) Training On Medical First Responder

6. Infrastruktur

Dalam melaksanakan tujuannya dalam memberikan pelatihan insfratuktur bagi warga palestina Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan pelatihan *project cycle* untuk para pelaku infrastruktur yang berasal dari Palestina. Program tersebut diberikan Indonesia karena kondisi Palestina akibat operasi militer Israel telah menyebabkan kerusakan besar terhadap rumah-rumah dan infrastruktur-infrastruktur untuk umum di Palestina. Karenanya, pemerintah Palestina perlu untuk merencanakan dan melaksanakan usaha-usaha perbaikan secepatnya, termasuk upaya-upaya rehabilitasi dan pembangunan kembali guna mengembalikan ketersediaan infrastruktur di negaranya.

7. Sumber Daya Energi dan Mineral

Pelatihan bidang energi ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)

bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) di bawah rerangka New Asian African Strategic Partnership (NAASP) Capacity Building for Palestine. Pelatihan yang diberika meliput :

a) *Training Course On Coal And Mineral Resource Management*
b) *Training On Energy Planning*

8. *Good Governance and Public Administrations*

Pemberian pelatihan dalam *good governance and public administration* merupakan pelatihan yang ditujukan untuk membantu Palestina menciptakan pemerintahan yang mempu memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan berasaskan demkorasi selain itu pelatihan ini juga diharapkan dapat membantu Palestina meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan dengan melalukan moderenisasi administrasi publik dan manajemen pelayan publik.

9. Pertanian

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Palestina dan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) melakukan pelatihan bagi warga Palestina di bidang pertanian, meliputi :

a) *Training On Ariticial Insemination For Dairy Cattle*
b) *Intenational Training Program Vegetable And Fruit Production*
c) *Training Program On Innovative Production In Vegetable Technique For Palestinian Officers*

10. Industri

Dalam pelatihan dibidang Industri Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian. Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi peserta Palestina dalam sektor pengelasan yang terakreditasi secara nasional dan internasional. Pelatihan diikuti oleh warga Palestina yang telah memiliki pengalaman bidang pengelasan dan industri terkait. Setelah mengikuti pelatihan tersebut para peserta diharapkan antara lain menguasai pengetahuan dan teknologi terkait materi, proses, desain, pembuatan, konstruksi, dan pengawasan kegiatan pengelasan, melakukan kegiatan pengelasan sesuai spesifikasi dan prosedur serta mengoptimalisasi kegiatan pengelasan dengan biaya yang dikeluarkan. Pelatihan tersebut diantaranya adalah ;

a) *Capacity Building In Plate Welder*
b) *Capacity Building On Textiles*
c) *Capacity Building In Ceramic*

11. Pertahanan

Pelatihan dalam bidang pertahanan dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) yang dilakukan di Pusat Pendidikan Zeni (Pusdikzi) TNI AD. Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan dalam bidang kontruksi, pencarian sumber daya air dan pembekalan listrik. Pelatihan yang diikuti oleh 4 orang peserta dari Palestina tersebut diadakan selama empat minggu dari tanggal 26 Maret 2013 hingga 17 April 2013 (diakses melalui http://militerindonesiamy.blogspot.co.id/2013/04/empat-warga-palestina-ikuti-pelatihan.html pada 26 Juni 2016).

12. Penghapusan Kemiskinan

Proverty Reduction atau penanggulangan kemiskinan merupakan pelatihan yang diberikan untuk membantu Palestina menanggulangi masalah kemisikinan di Palestina. Pelatihan tersebut diberikan melalui program *TCTP On Capacity Building For Proverty Reduction* (diakses melalui http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Kerjasama-Teknik.aspx pada 26 Juni 2016).

4.1.2 Pemenuhan Amanat Konstitusi

Pemberian bantuan teknis dalam kerangka *NAASP Capcity building for Palestine*

adalah bagian dari pemenuhan amanah kontitusi Indonesia yang tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Konsep kebijakan luar negeri Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI). Konsep kebijakan luar negeri Indonesia yang tertuang pada UUD RI 1945 alinea ke empat berbunyi:

> *"*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,"

Selain konsepsi kebijakan luar negeri yang tertuang di dalam UUD RI 1945 tersebut, Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negerinya juga memiliki sikap politik dalam menjalankan kebijakan luar negerinya yang kemudian juga diatur oleh Undang-Undang (UU). Sikap politik luar negeri Indonesia tertuang di dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Di dalam pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa ;

> "Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional".

Indonesia berharap melalui penekanan kapasitas, dimana melalui hal tersebut diharpkan tidak ada lagi kerusakan fisik lebih lanjut di Palestina. Dengan pengembangan kapasitas, berarti mereka akan lebih siap dalam menghadapi perkembangan situasi, terlepas dari keadaannya itu informal atau tidak. Hal ini tentunya sejalan dengan politik luar negeri Indonesia, dimana politik luar negeri Indonesia sangat menentang penjajahan dan semenjak kemerdekaan Indonesia, Palestina merupakan salah satu isu internasional yang dianggap perlu dipecahkan, karena itu Indonesia menganut kebijakan yang tidak akan pernah mengakui Israel sebelumnnegaranPalestinanberdiri (diaksesnmelaluinhttp://www.tabloiddiplomasi.org/previousnisuue/48julin2008/379-indonesia-menggalang-solidaritas-konkrit-bagi palestina.html pada tanggal 8 juli 2016).

4.1.3 Solidaritas Bagi Palestine

Melalui program *Capacity Building For Palestine* yang merupakan sebuah program yang lahir atas komitmen Indonesia dalam forum *New Asia Stretgic Partneship* memiliki tujuan untuk membantu Palestina menyiapkan sumber daya yang mempuni dalam berbagai bidang dan menghasilkan dukungan praktis terutama melalui pelatihan di daerah yang berbeda atau bidang yang dibutuhkan oleh Palestina sekarang dan untuk masa yang akan datang. Selain itu *Capacity Building For Palestine* memliki tujuan untuk memobilisasi bantuan teknis yang diberikan oleh Indonesia yang dibantu oleh organisasi internasional dalam mendukung penciptaan negara Palestina yang merdeka dan menjadi sebuah negara yang layak.

Solidaritas yang diberikan oleh Indonesia tidak hanya sebatas pemberian bantuan teknis berupa *capacity building* atau pembangunan kapasitas akan tetapi juga bentuk solidaritas yang diberikan Indonesia berupa dukungan politik dengan membawa masalah Palestina dalam forum-forum internasional. Palestina itu merupakan kunci dari segala permasalahan di Timur Tengah, melalui program *Capacity building for Palestine* Indonesia sangat berharap dunia akan melihat bahwa ini adalah bentuk solidaritas kongkrit dari negara-negara berkembang khususnya negara Asia-Afrika. Kedua, kita memberikan bantuan secara kongkrit, tidak hanya sekedar kumpul-kumpul untuk memberikan *statement* mendukung Palestina (diakses melalui http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/48-juli-2008/379-indonesia-menggalang-

solidaritas-konkrit-bagi-palestina.html pada tanggal 8 juli 2016).

4.2 Posisi Prgoram *Capacity Building for Palestine* Dalam Kepentingan Nasional Indonesia

Salah satu kepentingan nasional Indonesia yang secara konsisten dilakukan adalah dengan berupa menciptakan perdamaian dan memberikan dukungan bagi negara-negara yang belum mendapatkan kemerdekaan, dalam hal ini adalah Palestina. Dalam kepentingan nasional Indonesia isu palestina merupakan sebuah *permanent interest* karena Indonesia secara konsisten memberikan dukungan bagi Palestina melalui berbagai upaya yang salah satu ditempuh melalui program *Capacity Building For Palestine* yang merupakan kerangka dari *New Asia Africa Strategi Partnerhsip*. Pemberian bantuan, khususnya bantuan pembangunan kapasitas bagi Palestina saat ini masih menjadi salah satu prioritas utama Politik Luar Negeri (Polugri) Indonesia. Posisi pengembangan kapasitas atau capacity building for Palestine merupakan bagian dari kepentingan pokok Indonesia.

4.3 Hasil Yang Didapat Indonesia Dalam *Capacity Building for Palestine*

Hasil yang didapat dari yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam pemberian bantuan teknis berupa *Capacity Building* atau pengembangan kapasitas adalah Indonesia berhasil memenuhi kepentingan nasionalnya dalam berupaya menciptakan perdamaian dunia. Meskipun dengan adanya program tersebut tidak serta merta melahirkan negara Palestina yang merdeka dan bebas, aksi Indonesia dalam memberikan bantuan teknis berupa pengembangan kapasitas yang memiliki tujuan sebagai sebuah upaya dalam mempersiapkan rakyat Palestina ketika memeperoleh kemerdekaannya, menunjukan Indonesia berhasil memnuhi amanah konstiti yang berada dalam UUD 1945.

Hasil jangka panjang yang diharapkan Indonesia adalah harapan bahwa apabila Palestina telah memperoleh kemerdekaaanya, Palestina merrupakan mitra strategis bagi Indonesia. Indonesia berharap akan adanya sebuah kerja sama dibidang-bidang central dari kedua negara baik kerja sama ekonomi, politik budaya ataupun memberikan beasiswa bagi masing-masing warga negara.

Dalam bidang ekonomi, hasil yang akan didapat Indonesia adalah mitra dagang yang kian erat dengan Palestina khusunya dalam ekspor dan impor sumber daya energy. Sejauh ini perdagangan bilateral Indonesia-Palestina mencatat volume perdagangan tertinggi pada tahun 2010 dengan total US$ 3.451.200.

Selain itu, dari bidang seni budaya dan pendidikan dari hasil yang diperoleh Indonesia setelah pemberian bantuan teknis berupa pengembangan kapasitas adalah terbukanya peluang pariwisata dari warga Palestina menuju Indonesia dan Indonesia diajidakan sebagai temapat warga Palestina untuk melakukan pendidikan, khususnya dalam bidang pertanian karena minat besar warga Palestina adalah dalam bidang pertanian.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Kepentingan nasional Indonesia dalam setiap dukungannya terhadap Palestina merupakan sebuah bentuk dari amanah konstitusi yang menyatakan sikap Indonesia sebagai Negara yang berusah meciptakan perdamaian dunia.
2. Dalam memberikan dukungannya terhadap Palestina Indonesia melakukan berbagai upaya guna menjadikan Palestina sebagai sebuah Negara yang bebas dan merdeka. Upaya yang dilakukan Indonesia ditempuh melalui berbagai cara, baik secara bilateral dengan memberikan dukungan langsung bagi Palestina maupun dengan membawa isu Palestina kedalam forum-forum internasional, salah satu bentuk dukungan

Indonesia dalam forum internasional adalah dalam forum *New Asia Africa Strategi Partnership.*

3. Dalam *New Asia Africa Strategi Partneship,* Indonesia mengusilkan untuk memberikan bantuan teknis bagi Palestina berupa sebuah pengembangan Kapasitas atau *Capcity building* yang digagas melalui *New Asia Africa Strategic Partnership Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine*. Dalam pertemuan tingkat menteri tersebut disepakati sebuah program yang beranama *Capacity Building for Palestine*.
4. Melalui *Capacity Building for Palestine*, Indonesia bertujuan untuk membantu Palestina dalam melahirkan tenaga-tenaga kerja ahli dalam bidang-bidang yang dibutuhkan oleh Palestina yang nantinya menjadi sebuah manifetasi bagi Palestina dimasa sekarang ataupun dimasa yang akan datang. Selain melalui *Capacity Building for Palestine,* Indonesia memiliki harapan agar Palestina memiliki kesiapan apabila nantinya menjadi sebuah negara yang bebas dan merdeka.

Daftar Pustaka

Buku

Anni Milen. 2004. Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Diterjemahkan secara bebas. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja.

Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Burchill, Scott and Andrew Linklater . 2001. Theories of International Realtions Fisrt Edition. New York : Palgrave Macmillan

Brown, Lisanne, and Kate Macintyre. 2001. Measuring Capacity Building. Carolina: University of North Carolina.

Coulombis, Theodore A. dan Wolfe, James H. 2004. Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power, terjemahan Marcedes Marbun. Putra Abardin : Jakarta.

Jackson, Robert and Georg Sorensen. 2014. Pengantar Studi Hubungan Internasional : Teori dan Pendekatan.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Jemadu, Alexius. 2014. Politik Global, Dalam Teori Dan Praktik Edisi 2. Yogyakarta:Garaha Ilmu.

W. And Eugene R. Wittkopf. 2003. World Politics : Trend and Transformation. Belmont:Wadsworth.

Lamoureux, Florence. 2003. Indonesia : A Global Studies Handbook. California : ABC-CLIO.Inc

Coulombis, Theodore A. dan Wolfe, James H. 2004. *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*, terjemahan Marcedes Marbun. Jakarta : Abardin Putra.

Elektronik

Dampak Negatif konflik Palestina Munculkan Banyak Pengangguran. Diakses melaluinhttps://www.islampos.com/dampaknegatifnkonflikpalestinamunculkan-banyak-pengangguran-186461/ [5 Maret 2016].

DeklarasinKemerdekaannPalestina.Melaluinhttp://nasional.sindonews.com/read/991400/149/kaa-sepakati-deklarasi-kemerdekaan-palestina-1429496188 [11 Juli 2016].

Deklarasi Palestina : Dukungan Asia Afrika ke Negara Terjajah. Melaluinhttp://www.cnnindonesia.com/internasional/20150423223700-106-48871/deklarasi-palestina-dukungan-asia-afrika-ke-negara-terjajah/ [11 Juli 2016].